

Penguatan Institusi Lokal dan Menggerakkan Modal Sosial Melalui Komunitas Untuk Menciptakan Kampung Berdaya

Tri Yuliyanti

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
Email: diazkakan@gmail.com

Abstract

In carrying out its work a manager will use the concepts of management to facilitate the implementation of the task. By applying good public management practices and true, then the success of building a village will be realized. This research uses qualitative method by using the main instrument of Chairman of RW which is also Chairman of 3G Community. Some supporting instruments include observation and interview guidelines and secondary data. The conclusion of this research is to plan and implement environmental improvement in the region of Glintung, the Head of RW directly formed a community called "Community of 3G" (Glintung Go Green). With the Chairman of the RW who also served as Manager in the community, now the village of Glintung transformed into a powerless village. This condition is because the 3G community has good management and strategy and effective in supporting the success of the program. As an umbrella for the implementation of environmental improvement, the Community adopted the management of the company for the public sector. While the big strategy is the empowerment of citizens through 3G community. Where the strategy gives a lot of benefits in the form of livelihood of citizens and communities in the implementation of environmental improvement.

Keywords: Community, Social Movement, Public Management, Local Institution

Pendahuluan

Perubahan paradigma pemerintahan dari “government “ ke “governance” membawa implikasi luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pola pelayanan publik. Jika selama ini pemerintah yang banyak mengambil prakarsa dalam urusan pelayanan publik dalam pemerintahan, maka dengan pola baru ini prakarsa itu bertumpu pada tiga pilar utama, yakni : pemerintah, pihak swasta (kelompok peduli) dan masyarakat. Oleh sebab itu peran pemerintah yang tadinya menjadi aktor utama dalam pembangunan dan penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur bergeser menjadi pendorong dan mampu memfasilitasi pihak lain untuk ikut aktif melakukan pembangunan. Dengan demikian, terjadi redefinisi peran negara, swasta dan masyarakat dalam pembangunan.

Persoalan awal yang muncul ketika pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan adalah kapasitasnya yang dinilai banyak kalangan masih rendah sehingga tidak memiliki kemampuan memadai untuk secara bersama -sama dengan pihak pemerintah, swasta mengelola penyelenggaraan pembangunan, termasuk pelayanan publik. Namun, dengan program pemberdayaan masyarakat yang banyak dilakukan oleh berbagai kalangan dewasa ini, secara berangsur keraguan tersebut berkurang dan bahkan dewasa ini banyak program- program pemerintah sudah menjadikan masyarakat sebagai pilar utamanya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, membawa momentum baru pelaksanaan pembangunan daerah, dari sistem terpusat (*sentralistic*) ke arah desentralisasi, dan dari dominasi pemerintah ke arah peningkatan peran-serta masyarakat secara luas. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pengalaman menunjukkan bahwa organisasi yang dibentuk masyarakat seperti komunitas penting kontribusinya dalam mendorong proses pembangunan yang bersifat partisipatoris. Peran ini tidak hanya dalam tataran kajian dan pengembangan konsep. Pentingnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, advokasi kebijakan, mempraktikkan (menguji coba) pelaksanaan pembangunan yang bersifat partisipatoris dinilai

dapat mendorong terciptanya *good governance*. Oleh sebab itu memilih isu partisipasi adalah strategi awal untuk mewujudkan hal tersebut.

Penelitian ini membahas tentang pengembangan Kampung 3G (*Glintang Go Green*) yang dulunya kumuh, tingkat ekonomiarganya rendah, sekarang menjadi kampung yang berdaya secara sosial, ekonomi dan budaya. Hal ini karenaarganya sudah melakukan suatu gerakan kepedulian terhadap lingkungan. Konsep Kampung 3G dianggap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat inovatif dan layak jadi percontohan Nasional. Kemendagri menilai pembangunan kampung ini berbasis partisipatif dan sangat layak jadi rujukan bagi Kepala Daerah seluruh Indonesia. Di dalam struktur kepengurusan, Kampung 3G tidak hanya menerapkan fungsi Ketua RW yang hanya melayani keperluan administrasi kependudukan masyarakat semata. Akan tetapi menempatkan Ketua RW sebagai Manajer penggerak pembangunan. Oleh karena itu tugas Ketua RW sekaligus Manager adalah membangun bersama masyarakat sekaligus melaksanakan program – program Pemerintah Kota Malang. Sudah pasti, pembangunan dimaksud mengacu pada program Pemerintah kota Malang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana seorang Ketua RW yang menjadi Agen dalam melayaniarganya hingga mampu memperkuat intitusi lokal dan menggerakkan modal sosial, serta upaya warga Kampung 3G menciptakan kampung yang berdaya. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dalam tataran teoretik dan praktik tentang manajemen publik. Sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan gerakan kepedulian terhadap lingkungan di wilayahnya.

KAJIAN TEORI

Strategi Penguatan Kelembagaan Institusi Lokal

Di dalam perkembangan pembangunan lembaga istilah lokal sulit didefinisikan. Pada tataran makro lokal adalah lawannya dari global. Lokal menurut pemahaman UU No. 32 Tahun 2004 adalah pada tataran mikro artinya istilah lokal untuk menyebut kawasan daerah tingkat satu/propinsi, daerah tingkat dua/ kabupaten atau kota, dan dimungkinkan lokal untuk menyebut yang lebih spesifik yaitu kecamatan dan desa bahkan RW. Jadi institusi lokal merupakan asosiasi komunitas setempat yang bertanggung jawab atas proses kegiatan pembangunan setempat (Esman dan Uphoff, 1982:9. Yang jelas institusi ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat.

Institusi lokal dalam komunitas harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling silang menyilang (*cross-cutting affiliation*) dan institusi lokal telah menyediakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) ketika komunitas lokal berada dalam situasi krisis. Kehadiran institusi lokal bukan atas kepentingan pribadi/individu tetapi atas kepentingan bersama, sehingga institusi lokal lama kelamaan menduduki pada posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Rasa saling percaya warga komunitas lokal yang digalang dan diasah melalui institusi ini semakin hari semakin didambakan sebagai modal sosial (*social capital*).

Institusi lokal ternyata mampu menjadi bingkai etika komunitas lokal (Purwo Santoso, 2002: 6). Institusi lokal pada dasarnya adalah regulasi perilaku kolektif, di mana sandarannya adalah etika sosial, sehingga institusi lokal mampu menghasilkan kemampuan mengatur diri sendiri dari kacamata normatif.

Modal Sosial (*Social Capital*)

Modal sosial merupakan kekuatan yang mampu membangun *civil community* yang dapat meningkatkan pembangunan partisipatif, dengan demikian basis modal sosial adalah trust, idiologi dan religi. Modal sosial dapat dicirikan dalam bentuk kerelaan individu untuk

mengutamakan keputusan komunitas, Dampak dari kerelaan ini akan menumbuhkan interaksi kumulatif yang menghasilkan kinerja yang mengandung nilai sosial.

Francis Fukuyama (1995) mengilustrasikan modal sosial dalam *trust, believe and vertrauen* artinya bahwa pentingnya kepercayaan yang mengakar dalam faktor kultural seperti etika dan moral. Trust muncul maka komunitas membagikan sekumpulan nilai-nilai moral, sebagai jalan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Ia juga menyatakan bahwa asosiasi dan jaringan lokal sungguh mempunyai dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan lokal serta memainkan peran penting dalam manajemen lingkungan. James S, Colement (1998) menegaskan bahwa, modal sosial sebagai alat untuk memahami aksi sosial secara teoritis yang mengkombinasikan perspektif sosiologi dan ekonomi. Pengertian ini dipertegas oleh Ismail Serageldin (1998) bahwa modal sosial selalu melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat muncul bukan semata dari interaksi pasar dan memiliki nilai ekonomis..

Dalam pandangan ilmu ekonomi, modal adalah segala sesuatu yang dapat menguntungkan atau menghasilkan, modal itu sendiri dapat dibedakan atas (1) modal yang berbetuk material seperti uang, gedung atau barang; (2) modal budaya dalam bentuk kualitas pendidikan; kearifan budaya lokal; dan (3) modal sosial dalam bentuk kebersamaan, kewajiban sosial yang diinstitutionalisasi dalam bentuk kehidupan bersama, peran, wewenang, tanggungjawab, sistem penghargaan dan keterikatan lainnya yang menghasilkan tindakan kolektif.

Menurut James Colement (1990) modal sosial merupakan inheren dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi membentuk jaringan sosial yang menciptakan berbagai ragam kualitas sosial berupa saling percaya, terbuka, kesatuan norma, dan menetapkan berbagai jenis sanksi bagi anggotanya. Putnam (1995) mengartikan modal sosial sebagai “*features of social organization such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit*”. Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringkerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial juga dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif. Hal ini sejalan pula dengan apa yang dikemukakan Bank Dunia (1999) modal sosial lebih diartikan kepada dimensi institusional, hubungan yang tercipta, norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial pun tidak diartikan hanya sejumlah institusi dan kelompok sosial yang mendukungnya, tapi juga perekat (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok sebagai suatu kesatuan.

Menurut Lesser (2000), modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi media *power sharing* atau pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggungjawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama.

Manusia belum disebut manusia yang sebenarnya, bila ia tidak ada dalam suatu masyarakat, karena itu pula maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia pada dasarnya tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dengan baik tanpa hidup bermasyarakat. Sejak lahir, manusia membutuhkan pertolongan manusia lain, sampai dewasa dan meninggal (dan dikubur), ia pun tetap membutuhkan manusia lain. Kemandirian manusia tidak diartikan sebagai hidup sendiri secara tunggal, tapi hidup harmonis dan adaptif dalam

tatanan kehidupan bersama. Seperti yang dikemukakan oleh Fairchild (1980) masyarakat merujuk pada kelompok manusia yang memadukan diri, berlandaskan pada kepentingan bersama, ketahanan dan kekekalan/kesinambungan.

Kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerjasama, kemampuan berempati, merupakan modal sosial yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Hilangnya modal sosial tersebut dapat dipastikan kesatuan masyarakat, bangsa dan negara akan terancam, atau paling tidak masalah-masalah kolektif akan sulit untuk diselesaikan. Kebersamaan dapat meringankan beban, berbagi pemikiran, sehingga dapat dipastikan semakin kuat modal sosial, semakin tinggi daya tahan, daya juang, dan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Tanpa adanya modal sosial, masyarakat sangat mudah diintervensi bahkan dihancurkan oleh pihak luar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Nasution (2003: 5) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka tentang dunia sekitar. Sedangkan Nana Syaodih Sukmadinata (2005: 60) menyatakan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Jadi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat dihasilkan data deskriptif melalui verbal dari lisan dan perilaku. Pengamatan juga dilakukan untuk menjelaskan fenomena sosial tertentu dimana peneliti dapat mengembangkan konsep dan menghimpun fakta yang kemudian dianalisis. Sumber data dalam penelitian ini dibagi 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung didapat dari sumber namun data didapat melalui orang lain atau berbentuk dokumen, media massa, dan literatur.

PEMBAHASAN

Rukun Warga (RW) sebagai lembaga kemasyarakatan dan mitra pemerintah daerah, memiliki peranan sangat besar dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan, dalam rangka meningkatkan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk mewujudkannya maka sangat di perlukan sistim keorganisasian yang handal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ketua RW mempunyai Tugas :

1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
2. Memelihara kerukunan hidup warga.
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Selain itu juga mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian antar ketua-ketua RT di wilayahnya
2. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah
3. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga

Terkait bahasan pada tulisan ini, pada pengembangan Kampung Glintung Go Green, ketua RW 23 Glintung Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang yakni Ir. H. Bambang Irianto: menyatakan bahwa fungsi Ketua RW yang menurut kebiasaan hanya

melayani keperluan administrasi kependudukan masyarakat semata, menurut hemat saya harus lebih dari itu. Melihat persoalan yang dialami masyarakat, saya mencoba menempatkan diri selaku manajer wilayah. Oleh karena itu, tugas saya adalah membangun bersama masyarakat, meringankan tugas pemerintah. Sudah pasti, pembangunan dimaksud mengacu kepada isu dan kebijakan Pemerintah. Salah satunya adalah isu lingkungan.

Dari statemen tersebut, Ketua RW 23 ini mencoba mengubah keadaan Kampungnya itu bersama masyarakat. Inisiatifnya diwujudkan dalam sebuah gerakan sosial bernama Glintung Go Green (3G). Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa gerakan ini tidaklah mudah, mengingat gagasan dasarnya ingin mempertahankan nilai-nilai luhur budaya “kampung” dan memperbaiki kondisi lingkungan dalam arti luas, sekaligus tetap menyerap nilai-nilai modern untuk memperkaya aspek sosial-ekonomi masyarakat.

.Gerakan 3G dimulai dengan kegiatan sederhana, yaitu penghijauan lingkungan yang diluncurkan pada bulan Pebruari 2012. Gerakan ini sekaligus mendukung program Pemerintah Kota Malang dalam melakukan gerakan penghijauan “Malang Ijo Royo-royo”.

Dalam pelaksanaannya disepakati, setiap rumah wajib memiliki tanaman hijau sebagai syarat untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan. Bagi mereka yang tidak mampu membeli tanaman, maka pihak RW menyediakan tanaman dan yang bersangkutan berkewajiban merawatnya. Tanaman yang dikembangkan bukan hanya asal hijau, dan indah, tetapi merambah ke tanaman yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari.

Secara swadaya, masyarakat mulai belajar bercocok tanam tanaman sayuran dan tanaman pangan. Di bawah bimbingan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur, teknologi yang diterapkan pun bervariasi, mulai dari cara konvensional di lahan dan di pot/polibag, sampai dengan sistem hidroponik. Hal tersebut dikenalkan, sekaligus agar masyarakat bisa memilih teknologi yang paling sesuai dengan kondisinya masing-masing.

Kinerja masyarakat Glintung dalam implementasi 3G rupanya menarik perhatian Pemda Kota Malang. Tumbuh-kembangnya 3G murni inisiatif masyarakat dan swadaya. Sejak tahun 2013 Glintung diikuti dalam “Lomba Kampung Bersinar”, gerakan “Kampung Hijau Decofresh”, sehingga pada tahun 2014 terpilih sebagai peserta lima besar kampung peraih nilai tertinggi dalam penilaian kebersihan di Kota Malang. Tanpa diduga pula, 3G juga menarik perhatian Menkominfo, Kemendiknas, Unibraw, Univ Tokyo Jepang.

Dari kampung yang tadinya kumuh disertai persoalan-persoalan sosial-ekonomi kini menjadi asri, nyaman dan tentram. konsep gerakan ini dimulai aspek sosialnya lebih penting daripada fisiknya Gerakan yang sifatnya *bottom up* dan swadaya itu, pelan tapi pasti terus bergerak maju. Partisipasi warga pun tumbuh dengan sendirinya. Di wilayah ini kerja bakti tidak mengenal waktu siang atau malam. Di tengah mereka tumbuh apa yang mereka sebut “Suku Dalu”, yaitu sekelompok warga yang secara khusus melakukan kerja bakti di malam hari.

Warga diberi kebebasan untuk berkreasi baik teknik yang akan diterapkan maupun penataannya. “Semua gerakan pembangunan tidak boleh parsial, harus komperhensif. Warga yang dianggap mampu serta pendamping dari BPTP Jatim menyusun konsep 3G secara tertulis (Renstra). Setelah dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, baru disosialisasikan kepada warga. Warga boleh memberi masukan. Perlu juga dicatat bahwa Renstra itu baru disusun setelah gerakan berlangsung sekitar satu tahun. Jadi, 3G bukan semata gerakan pertanian atau penghijauan semata, melainkan juga memperhatikan faktor-faktor lain yang secara keseluruhan mengakomodasi kebutuhan warga. Dalam gerakan 3G, selain ada kegiatan bercocok tanam atau penghijauan, ada juga pembuatan biopori, sumur injeksi, pembentukan koperasi, pembinaan kader lingkungan cilik, pengelolaan sampah, dan masih banyak lagi lainnya.

Kegiatan penghijauan atau bercocok tanam, tidak dibiarkan berdiri sendiri, karena pasti kait mengkait dengan faktor lain, termasuk unsur manusianya, yang secara keseluruhan adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan 3G. Selain itu, bagaimana meyakinkan dan mendorong warga agar kegiatan ini mengarah ke manfaat yang riil, yakni manfaat ekonomi. Sebab, pada umumnya manfaat kesehatan lingkungan yang kita dengungkan misalnya, biasanya tak bertahan lama, akan ada masa jenuhnya. Konsekuensinya bisa berdampak kepada keberlanjutan gerakan. Oleh karena itulah, dalam konsep 3G, manfaat ekonomi dalam jangka menengah-panjang juga dicanangkan. Salah satunya kawasan ini menjadi destinasi wisata edukasi kampung perkotaan.

Kesimpulan

Organisasi masyarakat penting kontribusinya dalam mendorong proses pembangunan yang bersifat partisipatoris. Keberhasilan RW 23 Kelurahan Purwantoro Kabupaten Malang merupakan wujud dari keberhasilan pembangunan yang menuntut partisipasi warga dan komitmen pimpinan. Fungsi pimpinan di RW tidak hanya melayani keperluan administrasi kependudukan semata, akan tetapi juga harus menjadi manajer wilayah yang harus membangun bersama masyarakat.

Yang paling penting dan harus ditekankan dalam organisasi pada pengembangan kampung 3G ini adalah, pertama kemandirian, meski konsekuensinya gerakan menjadi perlahan, yang penting terus ada progres. Warga tidak dimanjakan oleh bantuan. Karena faktanya sejak dulu, gerakan semacam itu hanya bergerak di awal, lalu bubar setelah bantuan dihentikan. Kedua, gerakan pembangunan harus tumbuh dari bawah (*bottom up*) dan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan warga. Oleh karena itulah, beberapa kegiatan yang dianjurkan Pemerintah Kota Malang, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan warga, tidak diterapkan. Kebijakan yang diterapkan di Kampung Glintung berdasarkan hasil musyawarah warga. Ketiga, warga harus diyakinkan untuk tidak menjadikan dana sebagai penghambat utama dan tidak menggantungkan diri kepada bantuan pemerintah. Tidak menolak kalau ada bantuan. Bantuan harus dipertanggungjawabkan dengan hasil yang sesuai. Keempat, gerakan harus melibatkan seluruh warga, betapa pun sulitnya. Di awal gerakan, jika 10% saja warga berpartisipasi aktif, maka itu sudah bisa dikatakan luar biasa. Dan juga dalam gerakan ini tidak boleh meninggalkan begitu saja warga yang kontra terhadap gerakan. Secara perlahan, mereka didekati dengan berbagai cara.

Daftar Pustaka

- Anita Nur Laili (2012), dengan judul “Gerakan Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi tentang Upaya Menciptakan Kampung Hijau di Kelurahan Gundih Surabaya)”
- David Osborne dan Ted Gebler, 1992, Mewirusaha Birokrasi (*Reinventing Government*) : Mentransformasi Semangat Wirausaha , Edisi terjemahan , Jakarta, Penerbit Pustaka Binaman Pressindo
- David Osborne dan Peter Plastrik, 2000, Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Edisi terjemahan, penerbit PPM, Jakarta
- Giddens, Anthony.1999. *The Third Way*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Joko Widodo, 2001, *Good Governance*, Telaah dan Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Surabaya, Insan Cendekia.
- Made Heny Urmila Dewi dan M. Baiquni (2010), dengan judul “Pengembangan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali”.

Nuriyanti dan Salim Zahid(2008), dengan judul “Membangun Generasi Konservasi Masyarakat Desa Hutan Melalui Gerakan Mandiri Berkarya Berbasis Pendidikan Green Socioentrepreneurship Education”
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah